

Kolaborasi Model *Pentahelix* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jombang

Arsyi Ananda Putri, ¹Diana Hertati

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia; diana.adne2021@gmail.com

Received: April 10, 2023; In Revised: June 14, 2023; Accepted: August 17, 2023

Abstract

Stunting is a national problem that is still a concern because it relates to the nutritional condition of toddlers as the nation's next generation. The Jombang Regency Government launched the *Pentahelix* collaboration involving five elements: academia, business, communities, government, and media, to reduce stunting rates. This study aims to identify, describe, and analyze the collaboration of the *pentahelix* model in accelerating the reduction of stunting in Jombang Regency. The type of research used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique consists of four analysis components: data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions or verification. Based on the research results, the five *pentahelix* elements contribute according to their respective functions. The implementation of collaboration is considered good with stable continuity experienced by the five *pentahelix* elements. Implementing the *pentahelix* collaboration program has proven to reduce annual stunting rates by up to 8.43% consistently.

Keywords: Governance, Local Government, Collaboration, *Pentahelix*, Stunting.

Pendahuluan

Kompleksitas permasalahan negara yang dialami oleh Pemerintah Indonesia kerap kali menempatkan pemerintah pada posisi yang sulit dalam mengambil keputusan suatu kebijakan. Berbagai tantangan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, terlebih pada masalah kesehatan yang menyangkut generasi muda sebagai penerus bangsa, salah satunya adalah *stunting*. *Stunting* menjadi permasalahan nasional yang masih menjadi perhatian di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan, permasalahan gizi memiliki dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga menindaklanjuti hal ini, urusan terkait *stunting* di wilayah masing-masing dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang berwenang. Namun, permasalahan terkait stunting adalah permasalahan yang cukup kompleks. Sehingga, pemerintah daerah membutuhkan pihak-pihak lain untuk terlibat dalam menyelesaikan persoalan terkait.

Pada studi administrasi publik, kolaborasi sangat diperlukan sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan rumit di berbagai lembaga, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah. Kolaborasi menjadi salah satu langkah yang fleksibel karena model ini memungkinkan semua pihak terlibat dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Kolaborasi juga akan menjadi pola berkelanjutan karena setiap pihak memiliki tugasnya masing-masing dan akan mendapatkan manfaat sesuai dengan kebutuhan mereka.

Status gizi adalah poin penting yang perlu diperhatikan dalam kesehatan, dimana usia balita adalah kelompok yang rentan terhadap permasalahan gizi, khususnya *stunting*. Risiko yang dihadapi anak ketika mengalami *stunting* tidak hanya terjadi dalam jangka pendek,

melainkan juga terjadi dalam jangka panjang. *Stunting* atau balita pendek adalah suatu kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita yang menyebabkan tinggi badan anak terlalu pendek untuk usianya (Dewanti et al., 2020). Kerusakan yang diakibatkan oleh *stunting* bersifat *irreversible* (tidak dapat diperbaiki), namun *stunting* merupakan keadaan yang bersifat *preventable* (dapat dicegah). Hal ini disebabkan, kondisi balita penderita *stunting* tidak hanya berdampak terhadap fisiknya saja, namun juga berdampak pada produktivitas dan kecerdasan otaknya (Supariasa & Purwaningsih, 2019).

Berdasarkan pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018, prevalensi balita pendek di Indonesia adalah sebesar 30,8%, lebih turun jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2013 yang sebesar 37,2%. Kemudian, pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, secara nasional angka *stunting* mengalami penurunan. Pada tahun 2019 angka *stunting* Indonesia sebesar 27.7%, kemudian turun menjadi 24,4% pada tahun 2021. Di sisi lain, target prevalensi angka *stunting* Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah sebesar 14%. Sehingga, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target angka nasional.

Permasalahan balita *stunting* pun terjadi di Jawa Timur. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, prevalensi balita *stunting* di Provinsi Jawa Timur masih tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 23,5%. Sebelumnya pada data SSGI tahun 2019, prevalensi balita *stunting* di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 26,9%. Sehingga, didapatkan bahwa dari tahun 2019-2021 angka prevalensi mengalami penurunan meskipun masih belum mencapai angka nasional dan target angka *stunting* oleh *World Health Organization* (WHO), yaitu sebesar 20% (Teja, 2019).

Kabupaten Jombang adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan prevalensi balita *stunting* masih jauh diatas target angka nasional. Menurut data SSGI 2021 tentang prevalensi balita *stunted* (tinggi badan menurut umur) berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, angka *stunting* di Kabupaten Jombang sebesar 21,2%. Sebelumnya pada data tahun 2019, angka *stunting* Kabupaten Jombang sebesar 32,9%. Penurunan angka *stunting* sebanyak kurang lebih 11% menurut data SSGI 2021 adalah hal yang dapat diapresiasi. Namun, angka prevalensi sebesar 23,5% masih diatas angka nasional *stunting*. Sehingga, masih diperlukan upaya dalam menurunkan prevalensi *stunting*.

Tabel 1
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Jombang Tahun 2019-2021

No	Tahun	Diperiksa	<i>Stunting</i>	%
1	2019	76399	15237	19,94%
2	2020	72374	12271	16,95%
3	2021	75060	7678	10,23%

Sumber: Data Rekapitulasi *Stunting* Kabupaten Jombang 2019-2021

Data *stunting* berasal dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Berdasarkan data tersebut, prevalensi *stunting* di Kabupaten Jombang dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup konsisten hingga pada tahun 2021 mencapai angka 10,23%. Jika mengacu pada data diatas, secara nasional Kabupaten Jombang tergolong dibawah angka minimal persentase *stunting* yang sebesar 14%. Namun, ditemukan perbedaan angka prevalensi yang cukup besar antara data SSGI tahun 2021 dan EPPGBM tahun 2021. Hal ini disebabkan, data SSGI diambil melalui sampel hanya pada beberapa bayi, sedangkan data EPPGBM didapat

melalui pemeriksaan yang dilakukan pada semua bayi dan balita di Kabupaten Jombang. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Jombang tetap menaruh perhatian kepada kedua data ini meskipun didapat adanya perbedaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan program berbasis masyarakat, melakukan kolaborasi antara beberapa pihak adalah suatu hal yang perlu dilakukan. *Collaborative governance* menurut (Duan et al., 2020) dikutip dalam (Hertati & Arif, 2022) adalah suatu proses dimana pemangku kepentingan menempatkan kepentingan masing-masing instansi untuk terlibat dan terikat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pendekatan kolaboratif mendeskripsikan bahwa sistem kolaborasi akan mengenalkan tentang berbagai jenis konsep yang menjebatani suatu proses, terutama antara sektor pemerintah dengan sektor swasta. Kepentingan dan kebutuhan akan permasalahan yang dibahas akan diselesaikan melalui dialog dan kolaborasi (Kurniasih, 2017).

Pemerintah Kabupaten Jombang bersama lembaga publik, lembaga privat, serta masyarakat terus mengupayakan program-program yang dapat mendukung turunnya angka *stunting* di Kabupaten Jombang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka menekan angka *stunting* adalah dengan melaksanakan kolaborasi melalui komitmen *pentahelix* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang. Pelaksanaan komitmen *pentahelix stunting* dilakukan dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang terdiri atas 5 (lima) unsur yang saling bersinergi dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kelima unsur tersebut antara lain adalah Unsur Pemerintah Daerah (OPD terkait), Unsur Media, Unsur *Civil Society* (masyarakat), Unsur Pendidikan, dan Unsur Organisasi Profesi/Bisnis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang meraih penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2022 yang diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang telah menunjukkan komitmen, dukungan, serta jasa dalam program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) berfokus untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu fokus dari program Bangga Kencana, yaitu penurunan *stunting* yang juga menjadi program strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI).

Menurut Soemaryani (2016) dikutip dalam (Aribowo et al., 2018), model *pentahelix* adalah sebuah referensi yang digunakan dalam usaha pengembangan sinergi oleh beberapa instansi yang terkait dalam rangka mencapai tujuan. Pendekatan *pentahelix* adalah perluasan dari model *triple helix* yang didalamnya terlibat baik unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga nonprofit dengan tujuan mewujudkan suatu inovasi. Menurut (Awaluddin et al., 2016), *pentahelix* memiliki peran yang penting dalam industri kreatif digital di Indonesia sebagai kerja sama tersinergi yang melibatkan lima pihak. Lima komponen *pentahelix* yang saling bersinergi tersebut memiliki kontribusi masing-masing yang saling berkaitan, yaitu akademisi (*academician*), bisnis (*business*), komunitas (*community*), pemerintah (*government*), dan media (*media*). Komitmen dan sinergi yang kuat memegang kunci utama atas keberhasilan inovasi kolaborasi ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Kolaborasi Model *Pentahelix* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jombang.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Siyoto & Sodik, 2015), penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori *pentahelix* oleh (Awaluddin et al., 2016) yang terdiri atas akademisi, bisnis, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media. Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data bertujuan untuk mendapatkan jawaban terkait fokus permasalahan dalam topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang diungkapkan oleh (Miles & Huberman, 2014). Teknik analisis data ini memiliki empat komponen analisis, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Kolaborasi Model *Pentahelix* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jombang.

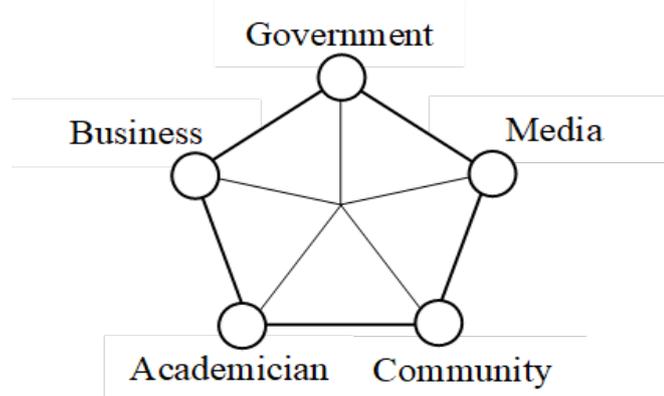
Hasil dan Pembahasan

Model *pentahelix* adalah sebuah model kolaborasi yang terdiri atas lima unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*), yaitu akademisi, komunitas, bisnis (ekonomi), pemerintah, dan media. Model *pentahelix* dikenal dengan konsep ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, dan Media*) (Slamet et al., 2017). Komitmen dan sinergi yang kuat memegang kunci utama atas keberhasilan inovasi kolaborasi ini. Melalui kerja sama yang sinergis, diharapkan terwujudnya inovasi yang didukung oleh sumber daya yang bersinergi dengan optimal. Kolaborasi *pentahelix* memiliki peran penting dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan memajukan sosial ekonomi daerah. Menurut (Soemaryani, 2016) dikutip dalam (Khusniyah, 2020), model *pentahelix* adalah sebuah referensi untuk mengembangkan sinergi antar instansi dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Unsur *pentahelix* bermula dari *triple helix* dengan komponen di dalamnya, yaitu *Academician, Business Sector, dan Government*. Konsep *triple helix* menitikberatkan pada hubungan antara perguruan tinggi, sektor bisnis, dan pemerintah. Selanjutnya, ditambahkan satu unsur yakni *community/civil society*, sehingga terjadi pengembangan konsep pada *triple helix* yang menjadi *quadruple helix*. Kemudian, ditambahkan satu unsur lagi, yaitu media yang akhirnya berkembang menjadi *pentahelix*. *Pentahelix* memiliki peran yang penting dalam industri kreatif digital di Indonesia sebagai kerja sama tersinergi yang melibatkan lima pihak.

Gambar 1

Model Kolaborasi *Pentahelix*



Sumber: Diolah oleh penulis (Awaluddin et al., 2016)

Lima komponen *pentahelix* yang saling bersinergi tersebut memiliki kontribusi masing-masing yang saling berkaitan, yaitu: 1) Akademisi (*Academician*), berperan sebagai konseptor. Akademisi pada hal ini menjadi sumber pengetahuan dengan konsep-konsep teori yang relevan; 2) Bisnis (*Business*), berperan sebagai enabler. Komponen bisnis dalam hal ini melakukan proses bisnis yang memiliki relevansi dengan program yang akan berjalan dalam mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah; 3) Komunitas (*Community/Civil Society*), berperan sebagai akselerator. Komunitas pada hal ini merupakan orang-orang yang memiliki minat dan relevan dengan program yang akan dijalankan. Komponen ini berperan menjadi perantara atau penghubung antar stakeholder; 4) Pemerintah (*Government*), berperan sebagai regulator. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai regulator yang memiliki peraturan dan controller yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program; 5) Media (*Media*), berperan sebagai expender. Media dalam hal ini memiliki peran sebagai pendukung publikasi terhadap program yang akan dijalankan.

Stunting adalah permasalahan serius yang masih menjadi perhatian di Indonesia, sebab kasus ini menyangkut pada tumbuh kembang anak yang akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah balita *stunting* yang tidak sedikit. Tercatat menurut data SSGI 2022 prevalensi balita *stunting* Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang terus mengencangkan upaya dalam rangka penurunan angka *stunting*.

Berdasarkan data SSGI tahun 2021 tentang prevalensi balita *stunted* berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, angka prevalensi Kabupaten Jombang sebedar 21,2%. Sedangkan jika melihat berdasarkan data EPPGBM, pada tahun 2021 angka prevalensi *stunting* Kabupaten Jombang adalah sebesar 10,23%. Namun, pada data terbaru, yaitu data SSGI tahun 2022, angka prevalensi *stunting* Kabupaten Jombang mengalami kenaikan menjadi 22,1%. Sedangkan pada data EPPGBM 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 8,43%.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang adalah melaksanakan kolaborasi *pentahelix* yang disebut dengan komitmen *pentahelix*. Komitmen *pentahelix* adalah langkah terintegrasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kerjasama ini turut serta menggandeng berbagai pihak seperti akademisi, perusahaan/bisnis, komunitas masyarakat, OPD, dan media dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang. Kerjasama antar lima unsur ini didasarkan pada SK TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) yang didalamnya termuat susunan keanggotaan beserta dengan sasaran tugasnya.

Komitmen *pentahelix* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* yang terdiri atas 1) identifikasi sebaran *stunting*; 2) penyusunan rencana kegiatan; 3) penyelenggaraan rembuk *stunting*; 4) pemberian kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan perannya dalam intervensi gizi terintegrasi; 5) memastikan ketersediaan kader pembantu Pemerintah Desa; 6) peningkatan sistem pengelolaan data *stunting*; 7) pengukuran perkembangan anak; serta 8) melakukan review kinerja pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis terkait kolaborasi model *pentahelix* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang. Objek penelitian adalah Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini, fokus penelitian akan melihat pelaksanaan kolaborasi *pentahelix*, hubungan kerjasama, dan partisipasi stakeholder.

Akademisi

Akademisi dalam kolaborasi ini adalah perguruan tinggi. Pada hal ini, yang tergabung dalam kolaborasi *pentahelix* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang adalah Universitas Darul ‘Ulum. Menurut (Awaluddin et al., 2016), akademisi berperan sebagai konseptor, dimana akademisi memiliki peran sebagai sumber pengetahuan dengan konsep-konsep teori yang relevan. Selanjutnya, menurut (Halibas et al., 2017) akademisi berperan dalam meningkatkan dan mendorong penyampaian ide-ide serta pengimplementasian inovasi.

Penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh (Fitriana et al., 2021) didasarkan pada tri dharma perguruan tinggi. Penerapan tri dharma perguruan tinggi yang dimaksud adalah mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (Lian, 2019). Pada kolaborasi *pentahelix* ini, Universitas Darul ‘Ulum melaksanakan tugasnya atas dasar tri dharma perguruan tinggi, yaitu meliputi analisis situasi, mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan *stunting*, dan melakukan kegiatan pengabdian.

Sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Andayani et al., 2022), unsur akademisi dalam pelaksanaan upaya penurunan angka *stunting* dilaksanakan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Hertati et al., 2023) yang menunjukkan bahwa keterlibatan unsur akademisi pada program yang dilaksanakan adalah dengan melakukan penelitian yang didasarkan pada konsep. Universitas Darul ‘Ulum telah menjalani kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di Bidang kesehatan sejak tahun 2018 sebelum isu *stunting* muncul. Kemudian pada tahun 2021, Universitas Darul ‘Ulum tergabung dalam komitmen *pentahelix* dengan menandatangani MoU berkaitan dengan upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang. Sebagai konseptor dengan sumber pengetahuan, Universitas Darul ‘Ulum memiliki sumber tenaga, yakni dosen dan mahasiswa. Disamping banyaknya kegiatan kerja sama yang dilakukan, kontinuitas yang dialami oleh Universitas Darul ‘Ulum cenderung stabil.

Pada indikator analisis situasi dilakukan diskusi bersama dengan unsur *pentahelix* lainnya untuk menentukan desa-desa yang akan menjadi lokus *stunting* yang menghasilkan temuan desa-desa yang menjadi lokus *stunting*. Kemudian berkaitan dengan identifikasi faktor dilakukan dengan melihat kondisi keluarga yang memiliki potensi *stunting* yang kemudian menghasilkan temuan-temuan penyebab balita *stunting* di desa lokus *stunting*. Selanjutnya untuk kegiatan pengabdian, dilakukan dengan mengirim mahasiswa KKN ke desa lokus *stunting*. Sehingga, dari ketiga indikator ini didapatkan bahwa sebagai unsur akademisi yang berperan sebagai konseptor, Universitas Darul ‘Ulum menyalurkan perannya dengan melaksanakan tiga sasaran kajian, yaitu analisis situasi, identifikasi faktor penyebab *stunting*, dan kegiatan pengabdian.

Ketiga sasaran kajian yang menjadi tugas dari Universitas Darul ‘Ulum telah dilaksanakan dengan maksimal dengan kontinuitas yang stabil. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya kerja sama khusus yang dilakukan oleh pihak akademisi bersama Bappeda sebagai *leading sector*. Kerja sama yang dilakukan dengan Bappeda adalah pada pelaksanaan diskusi yang dilakukan pada saat rapat koordinasi.

Bisnis

Komponen bisnis/perusahaan yang tergabung dalam kolaborasi *pentahelix* ini adalah Forum TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Menurut (Awaluddin et al., 2016), organisasi bisnis memiliki peran untuk menjalankan proses bisnis yang memiliki relevansi dengan program terkait. Kontribusi bisnis dapat dilakukan dalam bentuk barang, pendampingan dana, dan jasa sesuai dengan ruang lingkup bisnis masing-masing (Andayani et al., 2022).

Sebagai enabler, Forum TJSL adalah sebuah forum yang di dalamnya tergabung beberapa perusahaan yang bersatu untuk menjalankan kegiatan sosial dengan tujuan dapat mencakup rentang yang lebih luas. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Forum TJSL di Kabupaten Jombang telah berjalan selama 2 tahun dengan bantuan Bappeda sebagai fasilitator. Pemerintah sebagai fasilitator pada hal ini adalah untuk menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah (Firdaus, 2020). Forum TJSL dibentuk dengan tujuan agar badan usaha dapat menjangkau target yang lebih luas dalam menjalankan suatu program. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan pada data pendukung yang ada, diketahui bahwa Forum TJSL masih belum memberikan kontribusi pada kolaborasi *pentahelix* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang. Sebelumnya, beberapa perusahaan telah memberikan kontribusi pada permasalahan *stunting* di Kabupaten Jombang. Namun hal itu dilakukan secara parsial perseorangan dari satu perusahaan saja, tidak berkelompok atas nama Forum TJSL.

Salah satu perusahaan yang telah berkontribusi pada kegiatan *stunting* adalah PT. MHI (Marga Harjaya Infrastruktur). PT. MHI memiliki program kesehatan yang perlu dicapai, sehingga hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan sebuah MoU dengan Puskesmas Bandarkedungmulyo untuk menjalankan program Duta CERIA. Program ini berfokus memberikan penyuluhan kepada remaja putri. Program Duta CERIA dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dengan sasaran program adalah remaja putri. Hal ini menjadi pertimbangan karena remaja putri adalah hulu awal kemungkinan terjadinya *stunting* pada anak. Kegiatan dilakukan dengan sosialisasi dan pendistribusian tablet tambah darah. Melalui program ini, diharapkan dapat mencegah kondisi *stunting* melalui remaja putri. Remaja perlu dibekali pemahaman tentang *stunting* yang meliputi penyebab, dampak, dan upaya yang dilakukan untuk mencegahnya (Wandini & Angesti, 2023).

Meskipun Forum TJSL masih belum berkontribusi sebagai sebuah forum dalam komitmen *pentahelix*, Forum TJSL masih tetap mendukung penuh pelaksanaan komitmen *pentahelix*. Tergabungnya Forum TJSL dalam kolaborasi ini diharapkan dapat membantu wilayah lokus *stunting* dengan rentang lebih luas, yaitu di beberapa kecamatan dalam kabupaten. Tanpa adanya Forum TJSL, satu perusahaan hanya dapat memberikan bantuan di wilayah dimana berdirinya perusahaan tersebut. Sejauh ini, Forum TJSL baru memberikan bantuan pada program bedah rumah, belum mencapai pada *stunting*.

Sehingga, dapat dimaknai bahwa unsur bisnis sebagai enabler yang berperan dalam menjalankan proses bisnis berkaitan dengan program yang relevan, sebagian telah terlaksana dengan baik. Kontribusi pada *pentahelix* sejauh ini hanya terlaksana secara parsial dari perusahaan satu ke salah satu wilayah, masih belum mencakup Kabupaten Jombang secara luas. Adapun kerja sama yang terjadi antara Bappeda dengan unsur bisnis adalah koordinasi yang dilakukan antara Forum TJSL dengan fasilitator yang berasal dari Bappeda Jombang.

Komunitas Masyarakat

Komunitas masyarakat berperan sebagai akselerator. Menurut (Awaluddin et al., 2016), komunitas pada hal ini merupakan orang-orang yang memiliki minat dan relevan dengan program yang akan dijalankan serta berperan menjadi perantara atau penghubung antar stakeholder. Komunitas berperan untuk memperlancar adopsi proses ekonomi (Dani Rahu & Suprayitno, 2021). Pada unsur komunitas masyarakat ini tergabung organisasi profesi dan kader

masyarakat. Organisasi profesi yang tergabung adalah organisasi profesi yang berada di bidang kesehatan dan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Pada upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang, komunitas masyarakat bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat berkaitan dengan permasalahan *stunting* pada balita.

Pada hal ini, salah satu organisasi profesi yang tergabung adalah PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) Kabupaten Jombang. PERSAGI Kabupaten Jombang telah tergabung dalam TPPS Kabupaten Jombang sejak tahun 2021. Fokus yang diampu oleh PERSAGI Kabupaten Jombang adalah pada intervensi spesifik, yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan audit di beberapa desa yang menjadi lokus *stunting*. PERSAGI Kabupaten Jombang sebagai organisasi profesi memiliki program kerja milik organisasi dan mengikuti rencana kerja yang dilakukan oleh unsur *pentahelix* lainnya. Program kerja milik organisasi dilaksanakan pada setiap Hari Gizi Nasional setiap tahun yang kegiatannya adalah melaksanakan bulan timbang dan pemberian edukasi terkait dengan permasalahan *stunting* yang berupa sosialisasi atau workshop. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu desa lokus *stunting*.

Selanjutnya, pada komunitas masyarakat, juga tergabung kader/pendamping yang bernama KPM (Kader Pembangunan Manusia) *Stunting*. KPM *Stunting* beranggotakan masyarakat terpilih yang memiliki kepedulian serta bersedia mendedikasikan diri untuk berperan dalam pembangunan manusia di desa, khususnya dalam monitoring penanganan *stunting*. kegiatan yang dilakukan kader adalah melakukan pendataan masyarakat pada kegiatan posyandu serta melakukan kampanye kecil terkait pencegahan *stunting* kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan posyandu. Kader juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk melakukan pendampingan pada ibu hamil. Kemudian, untuk mendukung kelancaran kegiatan yang dilaksanakan, dilakukan upaya pengembangan kepada kader dengan mengadakan pelatihan. Karena sebagai kader, penting untuk mendapatkan pemahaman yang benar (Andayani et al., 2022). Namun, masyarakat yang tergabung dalam KPM *Stunting* tidak hanya tergabung dalam satu kader, melainkan juga bergabung di beberapa kader lainnya. Sehingga, didapati kendala bahwa pendataan yang dilakukan oleh KPM *Stunting* beberapa kali mengalami keterlambatan.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, didapatkan bahwa partisipasi dari masyarakat dinilai sudah cukup bagus. Sebab, ketika masyarakat telah diberikan edukasi tentang bahaya *stunting*, hal tersebut akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang kemudian masyarakat akan lebih sadar terkait dengan bahaya *stunting* pada balita dan cara pencegahannya. Masyarakat aktif menghadiri sosialisasi atau *workshop* terkait *stunting* yang diadakan.

Sehingga, didapatkan bahwa unsur komunitas masyarakat yang berperan sebagai akselerator yang mencakup komunitas masyarakat yang memiliki minat dan fungsi yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan telah terlaksana dengan baik. Adanya organisasi profesi dan kader masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan data pada masyarakat. Namun, tidak ditemukan peran komunitas masyarakat sebagai penghubung antar unsur. Hal ini disebabkan, kegiatan kolaborasi *pentahelix* berada dibawah kendali pemerintah, khususnya Bappeda sebagai *leading sector*. Selain itu, tidak ditemukan kerja sama khusus yang terjadi antara Bappeda dengan komunitas masyarakat, dimana kerja sama yang dilakukan antara Bappeda dengan komunitas masyarakat adalah melalui kegiatan rapat koordinasi.

Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai regulator. Menurut (Awaluddin et al., 2016), pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki peraturan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Menurut (Rohman & Hardianto, 2019) dikutip dalam (Sabilla & Kriswibowo, 2021)

seiring berjalannya waktu, dalam memenuhi pelayanan yang diinginkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan pihak lain. Hal ini juga berlaku pada upaya kolaborasi *pentahelix* dalam upaya penurunan angka *stunting* di Kabupaten Jombang.

Pada susunan keanggotaan TPPS, posisi *leading sector* diampu oleh Bappeda Kabupaten Jombang. Unsur pemerintah memiliki tugas melakukan pengawasan, mensosialisasikan kebijakan, mencanangkan komitmen antar stakeholder, meningkatkan koordinasi, serta memastikan anggaran dana tersalurkan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh (Andayani et al., 2022) dalam penelitiannya, pemerintah daerah melalui Bappeda telah memprioritaskan penganggaran *stunting* sesuai dengan arahan Wakil Presiden RI.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan pada data pendukung yang didapatkan, peraturan yang digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kolaborasi ini tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Jombang. Selanjutnya terkait dengan susunan keanggotaan mengacu pada SK Bupati Jombang Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Jombang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hertati et al., 2023) dimana menyatakan bahwa pemerintah bertindak sebagai *controller* yang memiliki peraturan.

Pengawasan oleh unsur pemerintah dilakukan dengan terus memantau perkembangan yang dilakukan oleh setiap unsur dengan mengadakan serta menghadiri rapat koordinasi. Sosialisasi kebijakan disampaikan melalui rapat koordinasi dengan unsur pemerintah desa yang kemudian oleh pemerintah desa akan disampaikan kepada warganya. Rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar unsur meskipun di tengah kesibukan yang dialami oleh setiap unsur terkait.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat dua data yang menjadi acuan penurunan angka *stunting*, yaitu data SSGI dan data EPPGBM. Meskipun kedua data ini menyatakan angka yang berbeda terkait angka *stunting*, pemerintah tetap menginisiasikan kedua data ini untuk menjadi acuan, dimana pada data SSGI 2022 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 22,1% dan data EPPGBM 2022 mengalaih penurunan menjadi sebesar 8,43%. Menindaklanjuti penurunan angka *stunting* ini, pemerintah mengapresiasi unsur-unsur *pentahelix* yang telah turut andil dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang.

Tabel 2
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Jombang Tahun 2020-2022

No	Tahun	Diperiksa	<i>Stunting</i>	%
1	2020	72374	12271	16,95%
2	2021	75060	7678	10,23%
3	2022	65345	5509	8,43%

Sumber: Data Rekapitulasi *Stunting* Kabupaten Jombang 2020-2022

Sehingga, didapatkan bahwa unsur pemerintah yang berperan sebagai regulator yang merumuskan kebijakan dan penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan telah terlaksana dengan baik. Perumusan kebijakan diwujudkan melalui dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Jombang. Selanjutnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan diwujudkan melalui diadakannya rapat-rapat koordinasi yang membahas terkait dengan progress kegiatan setiap unsur serta untuk menguatkan komitmen unsur *pentahelix*.

Media

Media berperan sebagai expander. Menurut (Awaluddin et al., 2016), media memiliki peran sebagai pendukung dalam hal publikasi pada program yang sedang dijalankan. Penyebaran informasi dapat dilakukan baik melalui media cetak maupun media online. Informasi yang disajikan dengan memanfaatkan media yang ada, khususnya media online akan membuat pembaca dapat menikmati informasi secara efektif dan efisien (Ready & Rummyeni, 2016). Pada kolaborasi *pentahelix* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang, publikasi terkait dengan *stunting* dilakukan melalui media cetak, media online, dan radio. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Andayani et al., 2022) yang menunjukkan bahwa penyebaran informasi terkait *stunting* dilakukan melalui media online, yaitu website dan instagram.

Pada kolaborasi ini, tergabung Suara Jombang 104.1 FM merupakan stasiun Radio LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) dibawah naungan Kominfo Kabupaten Jombang. Sebagai unsur media. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan pada data pendukung yang didapatkan, media radio memiliki kontinuitas yang baik dalam pemberitaan berkaitan dengan *stunting*. Pemberitaan *stunting* itu dilakukan dengan membuat konten tetap yang terjadwal untuk disiarkan. Hal tersebut berupa edukasi dengan menghadirkan narasumber atau iklan singkat. Kegiatan pembuatan konten juga merupakan kerja sama dengan OPD. Selain itu, radio juga menyiarkan informasi jika ada program *stunting* yang sedang terlaksana.

Radio Suara Jombang memiliki program yang turut mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang. Program pertama adalah ILM (Iklan Layanan Masyarakat), yaitu penyampaian materi terkait *stunting* berdurasi singkat. Kedua, yaitu adlib berupa selingan ajakan komunikasi penyiar terhadap pendengar. Ketiga, yaitu talkshow interaktif yang berjudul Pojok Kesehatan dan Sapa Genre. Pojok Kesehatan dan Sapa Genre (Sahabat Anak dan Perempuan Generasi Berencana) adalah konten mingguan yang membahas tentang kesehatan. Pada program Pojok Kesehatan, Suara Jombang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, sedangkan pada program Sapa Genre bekerja sama dengan Dinas PPKB-PPPA.

Kemudian, pemberitaan tentang *stunting* juga dilakukan melalui media sosial milik radio, yaitu instagram. Instagram dipilih karena jangkauannya yang luas dengan target audiens dengan rentang usia 40 tahun kebawah. Tayangan siaran radio juga dapat ditonton ulang melalui channel youtube milik radio. Akun media sosial digunakan sebagai sumber informasi dan pemberitahuan terkait dengan siaran terbaru yang akan dilakukan oleh radio. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, tidak ditemukan banyak publikasi terkait dengan *stunting* dan konten kesehatan terkait *stunting* di akun instagram milik radio. Hal ini cukup disayangkan karena instagram merupakan media sosial yang dapat dikategorikan sebagai jejaring sosial yang mudah diakses dengan fitur yang lengkap serta mudah untuk digunakan (Abidin et al., 2021).

Sehingga, didapatkan bahwa unsur media yang berperan sebagai expander, yaitu melakukan publikasi terkait dengan program *stunting* dan penyebaran informasi telah terlaksana dengan baik. Media utama yang digunakan adalah siaran melalui radio yang kemudian dilakukan inovasi dengan membuat channel youtube dan akun media sosial instagram. Siaran radio yang berupa konten *stunting* dilaksanakan secara rutin setiap minggu, meskipun akun instagram tidak terlalu aktif menyebarkan informasi terkait *stunting*. Selain itu, tidak diemukan adanya kerja sama khusus antara pihak radio dan Bappeda selaku *leading sector*. Kerja sama yang terjadi dilaksanakan sebatas melalui rapat koordinasi yang kehadirannya diwakilkan oleh Dinas Kominfo.

Pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dinyatakan bahwa kolaborasi model *pentahelix* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang yang terdiri atas akademisi, bisnis, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media didapatkan hasil yang telah terlaksana dengan baik. Kolaborasi *pentahelix* yang dilaksanakan dikatakan baik dan sesuai dengan tujuan, yaitu menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Jombang. Dalam pelaksanaan kolaborasi *pentahelix* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Jombang ini, meskipun ditemukan beberapa kendala, bukan berarti hal ini menjadikan kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa selama dilaksanakannya kolaborasi, angka *stunting* Kabupaten Jombang turun secara konsisten dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2023 angka *stunting* mencapai 8,43% dibawah angka nasional yang sebesar 14%.

Simpulan

Dengan demikian, Kolaborasi Model *Pentahelix* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Jombang telah terlaksana dengan baik. Kolaborasi dilakukan oleh lima unsur *pentahelix*, yaitu akademisi, bisnis, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media. Bappeda sebagai *leading sector* mengkoordinasikan unsur-unsur *pentahelix* dengan baik melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin, baik rapat koordinasi dalam skala besar yang mengundang semua unsur *pentahelix* maupun rapat kecil yang hanya melibatkan unsur *pentahelix* yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kontinuitas yang dialami oleh kelima unsur cenderung stabil karena setiap unsur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pelaksanaan kolaborasi yang dinilai sudah baik ini dibuktikan dengan angka *stunting* di Kabupaten Jombang yang terus menurun dengan konsisten dari tahun ke tahun. Pada data tahun 2022, angka *stunting* Kabupaten Jombang turun menjadi 8,43% yang sudah termasuk dibawah angka nasional yang sebesar 14%. Walaupun pada beberapa unsur masih memiliki kendala, bukan berarti pelaksanaan kolaborasi belum terlaksana dengan baik. Sehingga, saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan kolaborasi ini adalah Forum TJSJ sebagai unsur bisnis diharapkan untuk dapat segera memberikan kontribusi terhadap permasalahan *stunting* di Kabupaten Jombang sebagai bagian dari *pentahelix*, masyarakat diharapkan lebih berperan aktif lagi untuk menjadi anggota kader untuk meminimalisir keterlambatan pengumpulan data, dan pengelolaan media sosial milik Radio Suara Jombang FM sebaiknya lebih ditingkatkan lagi untuk konsistensinya dalam memposting konten kesehatan tentang *stunting*.

Referensi

- Abidin, K. Z., Soegiarto, A., Masyarakat, H., & Jakarta, U. N. (2021). Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Publikasi Media online yang dapat digunakan oleh pengguna nya dengan berbagai aktivitas seperti joining , sharing , dan atau isi dari media sosial mereka pada dianggap sebagai media online yang dapat mengubah komunikasi. *Jurnal Riset Komunikasi*, 12(2).
- Andayani, Q., Ariadi, S., Koesbardiati, T., Fauziah, N., & Praharsena, B. (2022). Penta Helix “ Desa Emas ” Dalam Komitmen Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sumenep Provinsi. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*, 1, 64–75.
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21>

- Awaluddin, M., Sule, E., & Kaltum, U. (2016). The Influence Of Competitive Forces And Value Creation On Company Reputation And Competitive Strategy: A Case Of Digital Creative Industry In Indonesia With The Implication On Sustainable Business Performance. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(2), 201–234.
- Dani Rahu, P., & Suprayitno. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2286>
- Dewanti, C., Ratnasari, V., & Rumiati, A. T. (2020). Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Balita Stunting di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Probit Biner. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.48519>
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3(1), 32–40.
- Fitriana, A. D., Mutmainnah, I., & Halifah, S. (2021). Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Sesuai Bidang Keilmuan Sebagai Upaya Personal Branding Dosen. *KOMUNIDA: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 11, 195–217. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http>
- Halibas, A., Ocier Sibayan, R., & Lyn Maata, R. (2017). The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12(May), 159–174. <https://doi.org/10.28945/3735>
- Hertati, D., & Arif, L. (2022). *Stakeholders Collaboration Model in Integrated Waste Management in Gresik District, East Java*. 2022, 126–131. <https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2422>
- Hertati, D., Nurhadi, & Tukiman. (2023). Penta Helix Collaboration Model in Handling Problems of Waste Management. *7st International Seminar of Research Month 2022. NST Proceedings.*, 371–377.
- Khusniyah. (2020). Implementasi Model Pentahelix Sebagai Landasan Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Kediri (Studi Literatur). *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan*, 1–5. <https://conference.kahuripan.ac.id/index.php/SNapan/article/view/42>
- Kurniasih, D.-. (2017). Model Penguatan Kelembagaan Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Collaborative Governance). *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- Lian, B. (2019). Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 100–106.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Ready, A., & Rummyeni. (2016). Penggunaan Media Online Sebagai Sumber Informasi. *Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.*, 3(1). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/8438>

- Sabilla, A. A., & Kriswibowo, A. (2021). Implementation of the Principles of Good Governance in Combating Stunting in the Jabon District, Sidoarjo Regency. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 53–67. <https://doi.org/10.30996/dia.v19i1.4822>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, R., Ramdani, H., Hendriyanto, A., & Ilma, L. L. (2017). Strategi Pengembangan Ukm Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16(2), 136. <https://doi.org/10.25124/jmi.v16i2.319>
- Supriasa, I. D. N., & Purwaningsih, H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Malang. *Karta Rahardja, Jurnal Pembangunan Dan Inovasi*, 1(2), 55–64. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>
- Teja, M. (2019). Stunting Balita Indonesia Dan Penanggulangannya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI(22), 13–18.
- Wandini, K., & Angesti, A. N. (2023). Upaya Pencegahan Stunting Melalui Edukasi Gizi Pada Remaja SMA di Ruang Lingkup RSDH, Desa Cipenjo, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 5(1), 15–21.